

BUPATI DEMAK SERAHKAN RAPERDA PERUBAHAN APBD 2024, DPRD Soroti Angka Kemiskinan



VARIA LEGISLATIF

DEMAK (KR)-Usai mendapatkan persetujuan DPRD terhadap Perubahan KUA PPAS APBD 2024, Bupati Demak dr Hj Eisti'annah SE menindaklanjutinya dengan menyerahkan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024, Jumat (02/08/2024). Pada Rapat Paripurna terakhir di masa bakti 2019-2024, DPRD Kabupaten Demak menyoroti upaya penurunan angka kemiskinan yang terindikasi tidak tercapai target 0% pada 2024.

Ketua DPRD Kabupaten Demak HS

Fahrudin Bisri Slamet SE menuturkan, salah satu alasan peningkatan anggaran pendapatan dan belanja pada perubahan KUA PPAS APBD 2024 adalah untuk menurunkan angka kemiskinan yang tidak tercapai target 0% pada 2024.

"Kemiskinan ekstrim targetnya 0% pada 2024. Tapi karena tahun ini tidak tercapai, harus diusahakan pada 2025. Maka itu sebagaimana fungsi pengawasan DPRD dilakukan penelusuran, mencari penyebab belum tercapaian target kemiskinan ekstrim 0% tersebut.

Termasuk melakukan survei dan penghitungan angka kemiskinan sendiri oleh Pemda, bukan bergantung pada hasil penghitungan pemerintah pusat atau pemprov," kata FBS, sapaan Fahrudin Bisri Slamet, didampingi Ketua Bappemperda DPRD Kabupaten Demak, H Marwan.

Salah satunya dengan melihat indikator kinerja tiap OPD, terkait target dan realisasi capaian target kinerja tahun 2023. Termasuk di dalamnya kinerja kecamatan, hingga sekda, di samping OPD - OPD di lingkup Pemkab Demak.

Sehubungan itu, Bupati Eisti'annah meresponnya dengan berjanji menin-



Bupati Demak dr Hj Eisti'annah SE didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak saat menyerahkan nota pengantar Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak

daklanjuti arahan dan saran DPRD Kabupaten Demak terhadap perubahan KUA PPAS APBD 2024. Tak terkecuali terkait membuat strategi menyusun data angka kemiskinan yang bukan berdasar data BPS.

"Intervensi luar biasa untuk menekan angka kemiskinan telah ditempuh. Akan

tetapi penurunannya relatif sangat sedikit, dari semula 12,11% hanya bergeser sedikit di angka 11,9%. Tidak sesuai dengan intervensi yang telah kami lakukan," kata bupati.

Sedangkan terkait Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024, secara garis besar Bupati Eisti'annah

menyampaikan, pendapatan daerah Rp 2.592.979.519.568. Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 523.209.633.341, Pendapatan Transfer Rp 2.064.159.886.227, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 5.610.000.000.

Sedangkan belanja daerah disetorkan senilai Rp 2.715.143.546.059. Terdiri dari Belanja Operasional Rp 1.999.097.629.390, Belanja Modal Rp 292.313.950.826, Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp 431.731.965.853.

"Oleh karena ada surplus / defisit anggaran sejumlah Rp 122.164.026.591, maka agar sisa lebih pembiayaan anggaran nihil, pembiayaan daerah Rp 122.164.026.591," kata bupati.

Diharapkan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak 2024 segera dilakukan pembahasan. Sehingga di tahun 2024, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dan dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan ekonomis. Serta memenuhi persyaratan akuntabilitas. (ssj)

Bupati Semangati 300 Relawan Kebencanaan

PURWOREJO(KR)-Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH memberikan apresiasi tinggi kepada para relawan kebencanaan dalam kegiatan kumpul relawan di Heroes Park, Purworejo, Jum'at (28/2/2024). Kegiatan yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo ini juga diisi penandatanganan komitmen bersama oleh 27 organisasi relawan. "Peran relawan kebencanaan ini sangat krusial dan vital dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai bencana yang terjadi selama ini. Dedikasi, keberanian, dan keikhlasan mereka telah menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi semua," ucap Yuli.

Yuli menjelaskan, Kabupaten Purworejo memiliki potensi bencana yang cukup lengkap, memiliki dataran, pegunungan, perbukitan, dan pantai, memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman serta memiliki potensi bencana yang tinggi. "Berdasarkan indeks risiko bencana 2023, Kabupaten Purworejo berada pada ranking 7 Jawa Tengah dan ranking 278 nasional," jelasnya. Diharapkan, para relawan bencana terus kompak dan saling berkomunikasi, khususnya saat situasi darurat (bencana), tidak perlu jalan sendiri-sendiri dalam membantu, baik itu saat penanganan serta pemulihan pasca bencana. "Kompak bersama tentu akan menjadi cara penanganan yang lebih cepat," harapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Dede Yeni Iswantini MM menambahkan, sedikitnya ada 300 relawan kebencanaan di Kabupaten Purworejo yang berkumpul dalam kesempatan kali ini, pertemuan diagendakan dua hari hingga Sabtu (3/8). "Ada kegiatan sarasehan untuk saling konsultasi terkait keadaan di wilayahnya masing-masing. Ada kegiatan kesamaptaan, game untuk melatih ketangkasan, kekompakan dan mempererat tali silaturahmi para anggota relawan," imbuhnya. Menurutnya, relawan tidak hanya ada disaat darurat tetapi pada saat pra bencana, darurat dan pasca bencana. "Mulai bulan Juli 2024, kami sudah menetapkan SK Siaga Darurat Kekeringan, sampai hari ini kami sudah dropping 118 tangki air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekeringan," ujarnya

(*-5)-f

Salatiga Perjuangkan Exit Tol Pattimura

SALATIGA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga selesai dalam penyediaan tanah untuk keperluan exit tol Pattimura (Tamansari) Salatiga. Selama 14 tahun Salatiga memperjuangkan terwujudnya exit tom exit tol kota ini sudah ditangan pihak PT Trans Marga Jateng (TMJ). Rencana dimulainya pembangunan exit tol ini dilakukan sosialisasi di Joglo Kembar Jati Roso milik anggota DPR RI warga Salatiga, M Fadloli di Kauman Kidul Salatiga, Rabu (1/8).

Penjabat Walikota Salatiga, Yasp Khasani, menghadiri sosialisasi pembangunan exit tol dan menyampaikan paparan tentang progress pembangunan rump on/off exit dan tum exit tol Tamansari tersebut. Yasp dalam paparannya menyampaikan bahwa rencana tahap pembangunan exit tol Pattimura (Tamansari Salatiga) dimulai sejak tahun 2010 atau 14 tahun lalu, membutuhkan tanah (area) @seluas 2.723 meter persegi.

Ada 2 tahapan pembangunan yaitu tahap pertama pembangunan rump on/off exit tol tamansari dan tahap kedua pembangunan tum exit tol Tamansari. "Semua sudah disediakan dan selesai," katanya. Sedangkan pengadaan tanah seluas 629m2 milik aset Kabupaten Semarang diadakan dengan cara tukar menukar tanah dengan Pemerintah Kabupaten Semarang yang rencananya selesai pada tahun 2024 ini.

Untuk memenuhi pengadaan lahan, pada tanggal 07 Februari 2024 pemerintah Kota Salatiga mengajukan permohonan pergeseran rekening belanja tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100.000.000. Selanjutnya untuk tahun 2025, alokasi anggaran sebesar Rp 43.000.000.000 dan tahun 2026 senilai Rp 17.500.000.000. "Tugas kami Pemerintah Kota Salatiga sudah sampai di situ, tinggal kami menunggu tindak lanjut dan sebagainya dan sudah masuk di perencanaan kami di tahun 2024, 2025 dan 2026 dan akan di kawal langsung oleh Ketua DPRD dan Walikota Definitif Salatiga," kata Yasp.

Kepala Bappeda Salatiga, Agung Hendratmiko dihubungi wartawan mengatakan, proses permohonan dan upaya Kota Salatiga untuk mewujudkan exit tol Pattimura sudah cukup lama dari tahun 2010 (lama). Dari proses perijinan, perencanaan, pembebasan lahan, penganggaran. Dan sekarang sampai dengan ganti rugi tanah sudah tinggal membayar dan anggaran sudah ada. (Sus)-f

Pilkada Jateng 2024, Rawan Politik Uang

SEMARANG (KR) - Praktik Politik Uang (money politics) dikhawatirkan akan makin masif pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 35 daerah di Jateng pada November 2024. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Jawa Tengah, sedang gencar mengedukasi masyarakat termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan tokoh masyarakat untuk bersama mengeliminasi politik uang.

Hal tersebut disampaikan Dr H Multazam Achmad MA, moderator Focus Group Discussion (FGD) bertema Gerakan Antipolitik Uang dalam Pilkada Serentak 2024, yang diprakarsai isenatori Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Jawa Tengah, Dr H Abdul Kholik, SH Msi, di gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang. Peserta FGD berjumlah 21 orang, seluruhnya pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

Provinsi Jateng. Selain Abdul Kholik, FGD menampilkan narasumber Komisioner KPU Jateng Basmar Perianto, Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin, SAP MH, Ketua FKUB Jateng Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, asal Jawa Tengah, Dr H Abdul Kholik, SH Msi, di gedung DPD RI Jateng, Jalan Imam Bonjol, Semarang. Peserta FGD berjumlah 21 orang, seluruhnya pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)

ber dan jujur adil (jurdil) yang muaranya dapat menghasilkan pemimpin di daerah yang berkualitas dan mampu bekerja dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Namun fakta menunjukkan, penyelenggaraan Pilkada serentak selama 20 tahun ini, dari 500 lebih kepala daerah yang terpilih, 400 lebih diantaranya bermasalah dengan indikasi terlibat kasus hukum yang memicu utamanya akibat praktik politik uang yang merajalela



KR-Isdiyanto

Dr H Abdul Kholik (tengah), menandatangani Deklarasi Gerakan Antipolitik Uang, di akhir FGD.

hingga melanggar prinsip moralitas.

Abdul Kholik menyatakan prihatin, negara sudah menghargai rakyat diposisikan sebagai pemilik sah suara kemudian diberi kebebasan untuk

menggunakan hak suara sebaik mungkin, tetapi justru dikotori dengan maraknya jual beli suara dalam setiap. Fenomenanya, kini masyarakat resah, karena rendahnya moralitas. (Isi)-f

Lurah Harus Tingkatkan Pelayanan Publik

PURWOREJO (KR) - Kelurahan merupakan wajah pelayanan pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Salah satu tugas kelurahan adalah melaksanakan tugas pemerintahan di kelurahan serta membantu camat dalam urusan pemerintahan. Tidak terkecuali dalam pemberdayaan masyarakat.

"Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo," tegas Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat membuka Studi Komparasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, di Balcondes Karangrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten



KR-Hendri Utomo

Studi Komparasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.

Magelang. Ikut mendampingi bupati Yuli Hastuti diantaranya Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan itu, Bupati dan

rombongan juga sempat mengikuti studi lapangan dengan mengunjungi produk home industri jamur.

"Saya mengapresiasi studi komparasi ini, untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi kelurahan, dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Sebab, kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan

daerah," ucap Yuli.

Dijelaskan, sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, hal paling mendasar pada pelayanan publik, adalah masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan. "Saya menekankan kepada seluruh peserta untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan serta berinovasi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang prima dan terbaik," jelasnya.

Yuli menilai, pelaksanaan studi komparasi ini selain berkaitan dengan urusan pemerintahan juga

tentang pemberdayaan masyarakat. Terutama bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. "Terkait penguatan kemiskinan dan kasus stunting, pemerintah terus berupaya untuk mendapatkan CSR, bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, untuk itu data harus akurat, sehingga ketika bantuan ada, bisa langsung diproses," imbuhnya.

Kepala BKPSDM Agung Wibowo AP MM mengungkapkan, materi yang disampaikan dalam kegiatan studi komparasi sangat padat. Diantaranya tentang pengembangan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan UMKM, kepekerjaan secara umum dan penanganan penguatan kemiskinan serta netralitas ASN. (*-5)-f

Panen Hadiah Simpedes di Tol Khayangan

MAGELANG (KR) - Nomor kupon rekening tabungan Simpedes milik salah satu nasabah bank BRI Unit Mungkid terpilih mendapatkan hadiah 1 mobil Daihatsu Gran Max Pick Up dalam acara Panen Hadiah Simpedes BRI BO Muntlan Periode 2 Tahun 2023 yang dilaksanakan di area wisata yang ada di kawasan kaki Gunung Merbabu Magelang, tepatnya di Tol Khayangan Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Sabtu (3/8). Sedang nomor kupon tabungan Simpedes milik salah satu nasabah Bank BRI Unit Mendut terpilih mendapatkan hadiah 1 mobil Honda BRV.

Dalam kesempatan ini MBM Bank BRI BO Muntlan Rochmad Dwi Putranto, yang didampingi MBM Bank BRI BO Muntlan Nilla Ayu Puspitasari maupun

lainnya, menyerahkan duplikat kunci mobil kepada Kepala BRI Unit Mendut Rina Ririn dan Kepala BRI Unit Mungkid Erika Wijayati. Di forum ini Rochmad Dwi Putranto juga menyampaikan sambutan mewakili Pemimpin Cabang Bank BRI BO Muntlan Dani Ratmoko.



KR-Thoha

Penyerahan duplikat kunci mobil secara simbolis.

Rochmad Dwi Putranto mengatakan dipilihnya lokasi Tol Khayangan Sawangan Magelang sebagai lokasi untuk kegiatan Panen Hadiah Simpedes kali ini

diantaranya karena wilayah Sawangan merupakan wilayah binaan, dan cukup terpanggil untuk memajukan, mengenalkan potensi wisata Tol Khayangan kepada masyarakat, yang hal itu juga dapat menggerakkan UMKM dan ekonomi di Sawangan. Kesenian tradisional Topeng Ireng juga tampil di awal rangkaian acara. Hiburan musik dan pembagian doorprize juga ikut menyemarakkan rangkaian acara.

Sementara itu informasi yang diperoleh KR, Sabtu petang, menyebutkan posisi Simpedes pada akhir periode pengundian berada pada posisi Rp 627,3 miliar, atau meningkat Rp 35,8 miliar terhadap periode sebelumnya. Jumlah kupon yang diundi selama periode pengundian sebanyak 35.388.640 kupon. (Tha)-f